



Judul Artikel Jurnal:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58 /POJK.05/2020)**

Artikel Jurnal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Nama: Diana Melati Pakpahan**  
**NIM : 1710611206**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**  
**JAKARTA**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH  
PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (   
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58  
/POJK.05/2020 )**

**ARTIKEL JURNAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**DIANA MELATI PAKPAHAN**

**1710611206**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT  
PANDEMI COVID-19 ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58  
/POJK.05/2020 )

DIANA MELATI PAKPAHAN

1710611206

Tugas akhir ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi  
S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Januari 2021

Mengetahui,



Dekan  
Dr. Abdul Halim, M.Ag  
NIP.196706081994031005

Kepala Program Studi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Pembimbing

Dr. Suherman, S.H., LL.M  
NIP : 470006050771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel Jurnal diajukan oleh:

Nama : Diana Melati Pakpahan

NIM : 1710611206

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Atik Winanti, S.H., MH.

Ketua



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 29 Januari 2021

Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
Anggota II

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.  
Kaprodi

## PERNYATAAN ORI SNI LITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karyasaya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Artikel Jurnal ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Diana Melati Pakpahan

Nim : 1710611206

Tanggal : 13 Februari 2021

**Tanda Tangan:**



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Melati Pakpahan  
NIM : 1710611206  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis)\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2021

Yang menyatakan,



Diana Melati Pakpahan

## **ABSTRAK**

Coronavirus Disease (COVID-19) telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Kebijakan ini menyebabkan banyak peminjam di industri financial technology p2p lending tidak dapat melunasi kreditnya karena hilangnya pendapatan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak borrower ini sangat merugikan pihak lender. OJK merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan POJK Nomor 58 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran pandemi Covid-19 terhadap Lender Fintech P2P Lending dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Lender Fintech P2P Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang Kebijakan Countercyclical dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan Lender Fintech P2P Lending terkena dampak penyebaran Covid-19, sehingga dengan adanya Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 yang memberikan izin resrukturisasi bagi perusahaan Fintech serta mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum bagi pihak lender secara preventif dan represif diharapkan dapat mengatasi kerugian yang dialami oleh pihak lender di masa pandemi covid-19.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, Lender , fintech peer to peer lending, covid-19

## ABSTRACT

Coronavirus Disease (COVID-19) has spread throughout the world including Indonesia. The Indonesian government implements a work from home (WFH) policy. This policy causes many borrowers in the p2p lending financial technology industry to be unable to pay off their credit due to loss of income. This default made by the borrower is very detrimental to the lender. OJK responded to this problem by issuing POJK Number 58 /POJK.05/2020 concerning the Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. The problem in this research is how the impact of the spread of the Covid-19 pandemic on Fintech P2P Lending Lenders and how the legal protection of Fintech P2P Lending due to the Covid-19 pandemic based on OJK Regulation Number 58 / POJK.05 / 2020 This issue will be discussed with juridical research methods. empiric, using secondary data, which consists of primary legal materials, namely OJK regulations on Countercyclical Policy and related literature, analyzed descriptively analytically. The results of the study concluded that P2P Lending Fintech Lenders were affected by the spread of Covid-19, so that with the OJK Regulation Number 58 / POJK.05 / 2020 which grants restructuring permits for Fintech companies and regulates the principles of legal protection for lenders in a preventive manner, it is expected to be able to overcome the losses incurred. experienced by lenders during the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** legal protection, lenders, fintech peer to peer lending, covid – 19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020)*” ini dengan baik. Penulisan Jurnal ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesaikannya Jurnal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Suherman, S.H.,LLM. selaku dosen pembimbing jurnal yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal dengan baik;
5. Bapak / Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan dan seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Teristimewa kepada orang tua penulis tercinta, bapak Haroan Pakpahan dan ibu Dorti Siagian, serta kelima abangku yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat – sahabatku Chindy,Martina,Ghifara,bangYosef,Lisda,kak Itin dan teman seperjuangan yang sejak awal perkuliahan selalu ada serta semua teman-teman Fakultas Hukum yang telah membantu satu sama lain di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 13 Februari 2021

Diana Melati Pakpahan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.A. Latar Belakang.....	1
I.B. Rumusan Masalah .....	5
I.C. Tujuan Penelitian.....	5
I.D. Manfaat Penelitian.....	6
I.E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
II.A. Perlindungan Hukum.....	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	9
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OJK NOMOR 58/POJK.05/2020) .....	10
IV.A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending.....	15
IV.B. Perlindungan Hukum terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank .....	20
BAB V PENUTUP	
V.A. Kesimpulan.....	21

V.B. Saran.....	21
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN